

**URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA
MILITER**

SKRIPSI



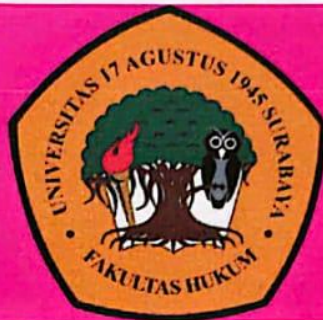
OLEH :

BAGUS ADAM PRIYAMBODO
NBI: 1312200236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

**URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA
MILITER**

SKRIPSI



Oleh:

BAGUS ADAM PRIYAMBODO

NBI: 1312200236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER

SKRIPSI



Oleh:

BAGUS ADAM PRIYAMBODO

NBI: 1312200236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2025

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN
SENKETA TATA USAHA MILITER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**OLEH:
BAGUS ADAM PRIYAMBODO
NBI: 1312200236**

Dosen Pembimbing:



**Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130611**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA
TATA USAHA MILITER

Oleh:

BAGUS ADAM PRIYAMBODO

NBI: 1312200236

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Desember 2025
Berdasarkan Keputusan Dekan No. SK/1634/ST/K/FH/XII/2025
Tanggal: 4 Desember 2025

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**

NPP : 20310130611

Sekretaris : **Dr. Endang Prasetywati, S.H., M.Hum**

NPP : 20310258846

Anggota : **Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**

NPP : 20310880149

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H

NPP: 20310190808

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini:

Nama : Bagus Adam Priyambodo

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, dengan judul:

“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER”

Benar-benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 2 Desember 2025
Yang membuat surat pernyataan



Bagus Adam Priyambodo

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Adam Priyambodo

NBI : 1312200236

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, dengan judul:

“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER”

Benar bebas dari Publikasi ganda dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Desember 2025

Yang menyatakan



Bagus Adam Priyambodo

1312200236

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Bagus Adam Priyambodo
NBI : 1312200236
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya tulis berjudul:

“URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER”

Adalah karya saya sendiri bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain. Kecuali yang dikutip secara tertulis dalam naskah skripsi ini. Apabila ternyata naskah skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan orisinalitas skripsi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 2 Desember 2025

Yang menyatakan



Bagus Adam Priyambodo

1312200236



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP 031-5931800
e-mail: perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagus Adam Priyambodo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)**, atas karya saya yang berjudul:

**“URGensi PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA
TATA USAHA MILITER”**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal : 2 Desember 2025.

Yang menyatakan



Bagus Adam Priyambodo

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita
Semua, Shalom, Om Swastyastu, Namó Budhaya, Salam Kebajikan*

Alhamdulillah, segala puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*URGensi PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER*”, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan rasa Syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Penulis ucapkan kepada Orangtua saya yaitu Ayah Yusuf Fajar Iswahyudi dan Ibu Anna Yuliana yang telah membiayai kuliah saya, memberikan motivasi dan dukungan, serta mendoakan yang terbaik untuk anak satu-satunya. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Saya selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Untuk teman-teman seperjuangan, terimakasih sudah menjadi tempat bercerita, keluh kesah, bercanda, dan berdiskusi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*URGENSI PERATURAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER*”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Koordinator program studi (Kaprodi) S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kebijakan untuk kemudahan penyusunan proposal skripsi.
4. Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. selaku dosen wali (doswal) yang telah mengarahkan Penulis sejak semester 1 sampai pada semester 7 ini serta memberikan masukan dan nasihat terkait perkuliahan kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen program studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memeberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan penulis.
6. Mayor Chk R. Faisal, S.H., M.H. selaku Hakim Militer pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang telah memberikan ilmu, diskusi dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan terkait dengan administrasi saya selama mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yaitu Jimli, Aldi, Wahyu, Ricky, Wisnu, Rizal Fahmi dan teman-teman lainnya yang sudah berjuang bersama dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman satu bimbingan yaitu Riko, Asti, Fareh, Hana yang sudah menemani bimbingan dari tahap penyusunan proposal skripsi dan skripsi ini.
10. Kepada diriku yang luar biasa tetap semangat, terimakasih telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penyusunan skripsi meskipun

terkadang saat belajar/mengerjakan sering ketiduran. Skripsi ini tidak hanya sekedar tugas akhir, tetapi salah satu pencapaian besar dalam kehidupan saya. Semoga pencapaian ini bisa menjadi proses untuk meraih kesuksesan di masa depan.

Surabaya, 2 Desember 2025

Penulis

ABSTRAK

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kewenangan Peradilan Militer diatur Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer salah satu kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Akan tetapi menurut pasal 353 UU Peradilan Militer khusus untuk hukum acara tata usaha militer penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Peradilan Militer diundangkan. Hingga saat ini belum adanya Peraturan Pemerintah yang dibentuk sehingga menimbulkan kekosongan norma. Dalam penulisan skripsi ini, tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi pembentukan peraturan hukum acara penyelesaian sengketa tata usaha militer dan untuk mengetahui model peraturan hukum acara tata usaha militer. Bahwa Urgensi pembentukan peraturan mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer didasarkan pada beberapa alasan sebagai yaitu untuk memastikan bahwa Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dapat memeriksa dan memutus sengketa tata usaha militer antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Militer; Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan; Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Militer. Model peraturan Hukum Acara Tata Usaha Militer dapat disamakan dengan Hukum Acara Tata Usaha Militer dengan memperhatikan ciri khas khusus tata kehidupan militer. Undang -Undang Hukum Acara Tata Usaha Militer dimasa yang akan datang perlu adanya Undang-Undang tersendiri dan dipisah dengan Undang-Undang Peradilan Militer. Tetapi mekanismenya tetap berada dalam lingkungan Peradilan Militer. Kesimpulannya perlu dibentuk peraturan hukum acara tata usaha militer agar pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum.

Keyword: Hukum Acara Tata Usaha Militer, Keputusan Tata Usaha Militer, Peradilan Militer, Sengketa Tata Usaha Militer.

ABSTRACT

Military Court is one of the executors of judicial power as regulated in Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of Military Court is regulated by Law Number 31 of 1997 concerning Military Court (Military Court Law). Based on Article 9 of the Military Court Law, one of the Courts within the Military Court environment has the authority to examine, decide, and resolve Military Administrative disputes. However, according to Article 353 of the Military Court Law, specifically for military administrative procedural law, its implementation is regulated by Government Regulation no later than 3 (three) years since the Military Court Law was enacted. Until now, no Government Regulation has been formed, thus creating a normative vacuum. In writing this thesis, the purpose of this research is to determine the urgency of establishing procedural law regulations for resolving military administrative disputes and to determine the model of military administrative procedural law regulations. That the urgency of establishing regulations regarding Military Administrative Procedure Law is based on several reasons, namely to ensure that the Court within the scope of Military Justice can examine and decide military administrative disputes between individuals or civil legal entities with Military Administrative Agencies/Officials; To provide legal certainty for justice seekers; To prevent abuse of power by Military Administrative Agencies/Officials. The model of Military Administrative Procedure Law regulations can be equated with Military Administrative Procedure Law by paying attention to the special characteristics of military life. The Military Administrative Procedure Law Law in the future needs to have a separate Law and is separated from the Military Justice Law. However, the mechanism remains within the Military Justice environment. In conclusion, it is necessary to establish regulations on military administrative procedure law so that justice seekers get legal certainty.

Keywords: Military Administrative Procedure Law, Military Administrative Decisions, Military Courts, Military Administrative Disputes.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Keputusan Tata Usaha Militer	13
2.2. Sengketa Tata Usaha Militer.....	17
2.3. Hukum Acara	20
2.4. Teori Kepastian Hukum	25
2.5. Teori <i>Abuse of Power</i>	31
BAB III PEMBAHASAN.....	37
3.1. Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer	37
3.1.1. Kewenangan Peradilan Militer	37
3.1.2. Problematika Ketiadaan Peraturan Pemerintah Tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer.....	47

3.1.3.	Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum Acara Tata Usaha Militer	65
3.2.	Model Peraturan Hukum Acara Tata Usaha Militer	71
BAB IV	PENUTUP	77
4.1.	Simpulan	77
4.2.	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		79